

# Implikasi Politik Dualisme Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia di Bulukumba

**Rahmi, Anggriani Alamsyah, Awal Muqsith, A. Muh. Rifky Nugraha**

*Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*

e-mail: rahmiii0808@gmail.com

## *Abstract*

*Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dampak politik dualisme Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Bulukumba dan bagaimana konfigurasi kekuatan politik DPD KNPI Bulukumba pasca dualisme. Artikel ini diuraikan secara kualitatif dengan menggunakan teori organisasi dan kelompok kepentingan. Kesimpulan umum artikel ini adalah bahwa dualisme DPD KNPI Bulukumba berdampak pada lemahnya komitmen kader dalam menjalankan kepemimpinan organisasi secara tunggal yang berakibat pada melemahnya kinerja organisasi, problem legalitas dan program kerja yang sarat kepentingan. Hal ini disebabkan oleh ragam kepentingan dari sejumlah kelompok yang berlatar belakang birokrat, tokoh organisasi formal dan kader partai politik yang bergabung ke dalam kepemimpinan DPD KNPI Bulukumba.*

## **Keywords :**

*Manajemen Organisasi, Kekuatan Politik, Kelompok Kepentingan, KNPI*

## **PENDAHULUAN**

Di Indonesia pemuda memiliki tempat yang sangat strategis dalam kehidupan sosial masyarakat. Sejarah besar berdirinya bangsa Indonesia tidak terlepas dari peran serta pemuda yang memiliki semangat dan idealisme (Zusma, 2016). Bangsa Indonesia tumbuh dari paham, gagasan, perjuangan serta pemikiran dari para pemuda untuk terus menyongsong kemajuan dan kemerdekaan. Salah satu peristiwa penting yang menunjukkan eksistensi pemuda Indonesia adalah ketika tercetusnya sumpah pemuda, dan mendesak generasi tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 (Fitri &

Bukhari., 2017). Pemuda kala itu dapat dikatakan solid karena berhimpun dalam organisasi yang dijalankan karena adanya kesamaan visi, tujuan, ideologi, idealisme, dan misi yang sama. Perhimpunan ini dikemudian hari dikenal dengan istilah organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) (Fitri & Bukhari., 2017).

Jhon D. Millet dalam Nursamsami, dkk. (2020) mengungkapkan bahwa organisasi adalah wadah bagi individu atau kelompok untuk berproses dan bekerja sama agar memiliki korelasi dan *feedback* yang saling menguntungkan baik itu individu maupun kepada kelompok. Masing-

masing organisasi yang berdiri tentu memiliki tujuan, visi-misi dan cita-cita yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut menghadirkan gengsi untuk menjalankan persaingan demi mewujudkan kepentingan masing-masing organisasi. Salah satu penyebab adanya persoalan di dalam organisasi tidak terlepas dari kekalahan dan gengsi kepemimpinan.

Hadirnya KNPI pada zaman Orde Baru tidak terlepas dari tujuan kolektif para pemuda untuk menyatukan perspektif, ideologi, dan menyatukan segala bentuk perbedaan di seluruh lapisan kelompok kepemudaan yang ada di Indonesia (Rompis et al., 2019). Eksistensi KNPI pernah melewati dan menuai banyak kritikan dan masukan dari berbagai kalangan pada era Reformasi, agar kiranya organisasi itu dibubarkan saja. Namun, manajemen organisasi yang disokong dengan sumber daya manusia mumpuni, KNPI berhasil bertahan dan eksis sampai hari ini (Fitri & Bukhari., 2017).

Pasal 7 Anggaran Dasar KNPI menjelaskan fungsi KNPI. *Pertama*, fungsi KNPI adalah sebagai ajang perjuangan bagi pemuda dalam menjalani kehidupan sosial pada masyarakat, bangsa dan negara. *Kedua*, KNPI memiliki fungsi sebagai tempat untuk melakukan koordinasi serta komunikasi untuk menyalurkan segala bentuk aspirasi dari OKP untuk mencapai peningkatan taraf hidup, derajat, status dan kesejahteraan sosial. *Ketiga*, KNPI berfungsi sebagai pengikat segala bentuk perbedaan yang ada di kalangan pemuda untuk menguatkan persatuan dan kesatuan

secara nasional untuk mewujudkan upaya pencapaian tujuan nasional yang cepat. *Keempat*, KNPI berfungsi sebagai rumah intelektual dan laboratorium kader bangsa yang berwawasan kebangsaan serta memiliki prinsip independen (Rompis et al., 2019). Salah satu fungsi strategis KNPI adalah memiliki kewenangan dan kedudukan yang sangat penting untuk membangun kolaborasi dan sinergitas dengan pemerintah untuk mencapai visi dan misi yang menjadi tujuan KNPI. Peran strategis KNPI dilihat dari segi upaya meningkatkan partisipasi politik di skala nasional sampai wilayah regional (daerah), terkhusus bagi elemen pemuda.

DPD KNPI Bulukumba merupakan organisasi yang mewadahi serta mengikat seluruh pemuda Indonesia secara umum, dan mewadahi serta menghimpun seluruh pemuda yang ada di Kabupaten Bulukumba secara khusus. Keanggotaan di dalam KNPI Bulukumba diisi oleh pemuda yang memiliki kapasitas dan kualitas yang baik dari berbagai elemen organisasi kepemudaan yang ada di Bulukumba. Pemuda yang tergabung KNPI merupakan penggerak yang mampu menopang kemajuan daerah dan dianggap sebagai agen perubahan yang mampu menjawab segala bentuk persoalan sosial masyarakat yang ada. Tetapi pada kenyataannya, perjalanan sebuah organisasi tentu tidak selamanya berjalan mulus, tantang konflik internal dan eksternal akan selalu mewarnai jalannya organisasi. Masalah internal ini, biasanya menyebabkan terjadinya dualisme organisasi. Dualisme adalah sebuah paham yang memandang jika dalam konteks berorgan-

isasi, institusi dan lembaga menempatkan dua prinsip dan pemahaman yang berbeda dan saling bertentangan.

Dalam konteks DPD KNPI Bulukumba, dualisme menjadi problem serius. Hal ini disebabkan masing-masing kelompok dan tokoh pemuda yang bergabung memiliki hasrat kuasa. Fenomena dualisme ini baru muncul sejak beberapa bulan yang lalu. Tokoh pemuda yang menjadi pemrakarsa lahirnya DPD KNPI baru di Kabupaten Bulukumba sekaligus menjadi ketuanya adalah putri dari Bupati Bulukumba yaitu Andi Inas Utami Muchtar. Begitu pun dengan kubu DPD KNPI yang telah ada sebelumnya juga diisi oleh pemuda yang memiliki *power* politik di Bulukumba, yakni Akhmad Rivandi.

Berdasarkan sudut pandang penulis, terjadinya dualisme tersebut tidak terlepas dari adanya kepentingan politik dari dua kubu DPD KNPI Bulukumba untuk menyongsong Pilkada 2024. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian adalah implikasi politik dualisme DPD KNPI Bulukumba.

## TINJAUAN PUSTAKA

Arthur Verlend Rompis, Novie Pioh dan Alfon Kimbal (2019) dalam penelitiannya tentang “Partisipasi politik pemuda (Studi di Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan)”, menguraikan bagaimana aktivitas politik pemuda yang bergabung KNPI di Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kegiatan partisipasi poli-

tik yang dijalankan oleh KNPI Minahasa Selatan cenderung memiliki karakteristik simbolik dan menuai permasalahan internal pengurus.

Artikel yang ditulis oleh Maulana Zusma (2016) berjudul “Dinamika Dalam Suksesi Kepemimpinan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau tahun 2014”. Penelitian ini membahas suatu fenomena yang menarik dalam suksesi kepemimpinan KNPI di Riau tahun 2014, di mana kali pertama ketua KNPI terpilih secara aklamasi dan juga ada intervensi dari kepemimpinan KNPI yang berasal dari dukungan Pemuda Pancasila. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses demokrasi di KNPI Riau periode XIII 2014 tidak menunjukkan hasil yang baik dan tidak ideal, kemudian panitia MUSPROV XIII KNPI Provinsi Riau tidak menampilkan keterbukaan informasi publik. Selanjutnya, suksesi kepemimpinan KNPI Riau, murni hasil kerja sama dan kongkalikong antara kubu Ari Nugroho dan Nasaruddin.

Sekalipun penelitian ini dan kedua penelitian di atas cenderung memiliki kesamaan tentang dinamika politik KNPI di tingkat lokal, namun yang membedakan adalah penelitian ini focus pada sejauhmana implikasi dari dualism kepemimpinan. Selain itu, penggunaan teori sebagai pijakan dalam memahami dinamika politik internal KNPI yang berbeda. Kami lebih melihatnya pada aspek manajemen organisasi dan kekuatan kelompok kepentingan dalam memahami kasus yang kami angkat.

## TINJAUAN TEORETIS

### *Organisasi*

Organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti kebutuhan spiritual, intelektual, ekonomi, politik, psikologis, sosiologis, kultural, dan sebagainya (Winardi, 2016). Organisasi sangat mempengaruhi dinamika di berbagai bidang kehidupan, khususnya di bidang politik. Organisasi yang memiliki kekuatan besar dan intervensi terhadap instansi pemerintahan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya mampu menunjukkan *power* terhadap aktivitas politik dalam meraih pucuk kekuasaan. Kehadiran karakter egoisme dan perselisihan pendapat antar anggota di internal organisasi dapat memicu terjadinya perbedaan haluan dan sudut pandang. Sehingga tidak lagi ditemui tujuan dan kesepakatan bersama, biasanya perpecahan itu terjadi karena adanya kepentingan yang berbeda. Dampak dari hal ini, menciptakan dualisme di dalam organisasi (Palgunadi, 2016).

Fenomena dualisme organisasi akan berakibat pada anggota-anggota dan kader yang ada. Mereka akan menemui dua visi dan misi yang berbeda, begitupun dengan ideologi serta tujuannya. Dualisme organisasi otomatis akan menimbulkan persaingan. Paling banyak ditemui ketika terjadi dualisme adalah perbedaan kepentingan politik, masing-masing akan menunjukkan eksistensinya dengan berbagai cara dan pendekatan kepada masyarakat yang menjadi sasarannya. Fenomena ini, sarat akan kepentingan yang ditunggangi oleh

masing-masing tokoh publik. Bahkan sebaliknya, organisasi dapat menjadi wadah dan rumah bagi suatu tokoh untuk memunculkan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat (Winardi, 2004).

Menurut Eisenhardt dalam Riinawati (2019) semakin besar sebuah organisasi dan semakin terfragmentasi kegiatannya, maka besar pula kemungkinan terjadinya konflik. Konflik merupakan suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya persepsi, ketidaksesuaian atau perbedaan pendapat antara dua pendapat (sudut pandang). Konflik juga muncul bukan hanya karena kepentingan masing-masing anggota saja, tetapi juga tidak lepas dari kepentingan pemimpinnya.

### *Kelompok Kepentingan*

Pada kenyataannya, kelompok kepentingan muncul dan hadir di tengah-tengah masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe kelompok. Tipe kelompok kepentingan itu, dapat berasal dari klasifikasi formal dan informal profesional, birokrasi, pedagang, buruh, pengusaha, organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, organisasi keagamaan, lembaga intelektual, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi cendekiawan/pakar, organisasi berbasis etnik (persamaan tempat tinggal dan garis keturunan) dan asosiasi perusahaan (Maiwan, 2016).

Kekuatan kelompok kepentingan bersumber dari para anggota dan sumber daya yang ada di dalamnya, baik materi, relasi, dan ideologi. Kehadiran kelompok kepentingan dapat menjadi kekuatan dalam pros-

es rancangan agenda, pembangunan wacana, isu, penyebar gagasan, perumusan kebijakan dan mampu menjadi pengawas serta pengontrol jalannya kinerja pemerintah. Kelompok kepentingan memiliki dua tipe yaitu privat dan publik. Tipe kelompok kepentingan privat mewakili suara secara terbatas, seperti dari kalangan profesional, buruh, akademisi, pengacara, dokter dan pengusaha. Sementara itu, tipe kelompok kepentingan publik mewakili kepentingan bersama secara menyeluruh dan mengakar. Kelompok kepentingan publik berperan mendesak pemerintah untuk merekonstruksi tatanan sosial yang ada, demi kepentingan bersama tanpa menguntungkan satu atau dua pihak saja (Maiwan, 2016).

Konsep kelompok kepentingan dapat dilihat dari dua hal (Lessy, 2007); *Pertama*, adanya kepentingan yang sama, menyatukan sekelompok orang untuk bergabung membentuk satu organisasi dengan nama tertentu dan tujuan tertentu. Organisasi tersebut berupa partai politik, yang menjadi akses untuk memperoleh jabatan politik.

*Kedua*, setiap tindakan kelompok kepentingan, itu terikat dengan masalah umum yang ditunjukkan untuk mengintervensi aturan pemerintah dan memasukkan kepentingan golongan. Jadi, keberadaan kelompok kepentingan, otomatis dapat mempengaruhi kualitas kerja dan eksistensi pemerintahan dengan sistem politik yang ada.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif yang bersifat studi kasus. Studi kasus yaitu jenis penelitian yang penulisnya mengkaji, mencari atau menyelidiki lebih mendalam terkait suatu fenomena, peristiwa, dinamika, baik yang berkaitan dengan individu seseorang, organisasi masyarakat ataupun lembaga (Hikmatwati, 2020). Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu, metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Kemudian, sumber data tersebut berupa sumber data primer (pertama) dan data sekunder. Adapun Proses penganalisisan data yang digunakan oleh penulis setelah semua data yang diperlukan terkumpul, yaitu teknik analisis data model Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dampak Bagi DPD KNPI Kubu Akhmad Rivandi

#### *Lemahnya Komitmen Kerjasama dalam Menjalankan Kepengurusan Organisasi Tunggal*

Persoalan egoisme dan gengsi menjadi poin mendasar yang menyebabkan dualisme DPD KNPI Bulukumba. Menurut kubu Akhmad Rivandi, masalah dualisme merupakan bagian dari dinamika dalam berorganisasi yang melibatkan sikap egoisme dan gengsi di kalangan pemuda, sehingga menyebabkan persaingan dalam gagasan dan struktur. Hal ini dianggap sebagai dinamika kepemudaan yang harus

ditanggapi secara positif. Seluruh stakeholder di Kabupaten Bulukumba dianggap penting untuk memberikan perhatian pada bagaimana pembangunan berjalan dengan baik. Jika ada perseteruan dengan tujuan yang sama, sebaiknya tujuan tersebut disatukan, karena jika ego diutamakan, maka tujuan bersama tidak akan tercapai.

Pernyataan di atas dapat dipahami jika individu-individu dalam sebuah organisasi perlu melakukan upaya kerja sama demi mewujudkan tujuan organisasi. Proses untuk mencapai tujuan itu, diperlukan interaksi yang padu antar anggota organisasi, karena mereka hadir dari berbagai latar belakang baik sifat, budaya, pendidikan, agama, suku, pemikiran, dan persepsi yang berbeda-beda.

#### *Melemahnya Kinerja Organisasi*

Hadirnya perbedaan dalam organisasi yang sama, memungkinkan terjadinya konflik dan pertentangan di dalam kepemimpinan organisasi. Konflik organisasi ketika tidak dimonitor, dikelola dan diarahkan dengan baik akan berakibat buruk terhadap aktivitas suatu organisasi, menurunkan kinerja organisasi bahkan menyebabkan perpecahan di dalam organisasi. Hal itu dapat berimplikasi pada munculnya dua organisasi yang sama namun, memiliki persepsi yang berbeda (Hutabalian, 2020; Kusdi, 2010).

Perbedaan pendapat dan selisih paham kadang kala dijadikan sebagai senjata utama untuk melakukan perlawanan dalam bersaing merebut kekuasaan. Sehingga, pengaruh perbedaan visi, misi dan tujuan

masing-masing anggota terpecah dan terbagi menjadi dua organisasi yang sama dengan tujuan yang berbeda. Hal ini pun menunjukkan bagaimana persaingan ketat untuk menunjukkan yang terbaik bagi anggota organisasi dan terkhusus kepada individu yang ada di luar organisasi, namun menjadi pihak yang akan diuntungkan.

#### *Melemahnya Komitmen Kader dalam Menjalankan Organisasi*

Dualisme DPD KNPI Bulukumba berdampak pada komitmen para kadernya. Komitmen adalah salah satu perwujudan daripada perjanjian dan pengabdian untuk menjalankan organisasi secara konsisten (Agus, 2016). Namun, munculnya kubu Andi Inas Utami Muchtar menunjukkan lemahnya komitmen anak muda dalam mengemban suatu organisasi. Padahal sebenarnya komitmen dalam sebuah organisasi adalah bagaimana memaksimalkan sumber daya di dalam organisasi agar tetap satu visi, satu tujuan dan satu arah. Komitmen yang terciderai dengan hadirnya DPD KNPI kubu Andi Inas Utami Muchtar yaitu keberadaan Surat Keputusan (SK) resmi dari pengurus provinsi yang dibuat secara mandiri tanpa memperhatikan legalitas formal turunan KNPI dari pusat yang resmi. Menurut Ketua DPD KNPI Bulukumba, Akhmad Rivandi, pengurus DPD KNPI merupakan hasil rekomendasi dari OKP yang ada di Bulukumba, dan para pemuda tersebut dianggap berkompetensi. Jika pemuda benar-benar berkomitmen, seharusnya tidak akan terjadi dualisme. Masalah ini juga mendapat sorotan dari Bupati, sebelumnya ia tidak

mencampuri dinamika yang terjadi di tubuh DPD KNPI Bulukumba. Tetapi pada akhirnya, Bupati Bulukumba menerbitkan surat yang berisi penetapan pengurus DPD KNPI yang baru, kubu Andi Inas Utami Muchtar. Ini semakin menguatkan munculnya dualisme DPD KNPI Bulukumba.

Kemunculan kubu Andi Inas Utami Muchtar merupakan bentuk konflik organisasi. Menurut Winardi (2004), konflik adalah suatu kondisi, di mana terdapat kognisi-kognisi, tujuan-tujuan antara individu-individu yang kemudian menimbulkan pertentangan di dalam organisasi yang bersifat antagonistik. Sementara itu, perspektif Wirawan (2009) menjelaskan konflik sebagai suatu bentuk selisih paham yang tersampaikan lewat ekspresi yang bersitegang antara dua belah pihak atau lebih. Selisih paham itu bergantung pada objek konflik, baik yang terpacu pada interaksi dan pola konflik yang tentu menghasilkan solusi dari suatu konflik. Kehadiran kubu Andi Inas Utami Muchtar sebagai kubu baru DPD KNPI Bulukumba didasari akibat adanya perbedaan persepsi, perbedaan kognisi dan perbedaan cara pandang dalam menjalankan organisasi. Ketika terjadi konflik tentu melibatkan anggota-anggota di masing-masing kubu. Keterlibatan anggota ini didasarkan adanya pola perilaku tertentu yang masing-masing dijalankan kedua individu yang bertindak sebagai patron dalam organisasi itu (Palgunadi, 2016).

Lahirnya dualisme tersebut tentu tidak terlepas dari adanya perbedaan visi dan tujuan, perbedaan itulah yang dapat dise-

but sebagai konflik. Menurut Akhmad Rivandi, dampak yang lebih spesifik mengenai dualisme DPD KNPI Bulukumba yaitu tidak jelasnya Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI Bulukumba yang ada di setiap kecamatan. Begitupun tidak memiliki kejelasan terkait OKP yang bergabung dalam DPD KNPI kubu tersebut.

Sementara itu, dampak dualisme DPD KNPI Bulukumba juga berpengaruh terhadap kaderisasi. Menurut Akhmad Rivandi, KNPI sudah diwakili oleh OKP yang berhimpun di dalam KNPI, organisasi itu berupa organisasi sayap partai, cipayang, organisasi kejayaan, dan keagamaan, yang memang menerima deklarasi, dan tentunya punya komitmen untuk membangun kepemudaan. Secara detail dampak dualisme DPD KNPI Bulukumba berdasarkan perspektif organisasi politik sangat berpengaruh terhadap tupoksi organisasi. Dua kubu DPD KNPI Bulukumba kebanyakan anggotanya bergabung sebagai anggota partai politik. Oleh karena itu, organisasi KNPI juga dapat dijadikan sebagai upaya pendekatan kepada masyarakat untuk menarik hati dan simpati masyarakat dalam menyelenggarakan program kepentingan individu dan partai politik.

### **Dampak Bagi DPD KNPI Kubu Andi Inas Utami Muchtar**

#### *Melemahnya Legalitas Organisasi*

Kemunculan kubu Andi Inas Utami Muchtar disebabkan oleh pengaruh kepentingan yang dijalankan oleh kubu Akhmad Rivandi. Hal itu dianggap sebagai masalah

yang dapat melemahkan legalitas organisasi, karena pada saat melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda), kubu Akhmad Rivandi berada di bawah kubu DPD KNPI Provinsi Sulawesi Selatan yang diketuai Nurkanita Maruddani yang secara legalitas diakui oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Namun, pada saat masa pelantikan, Akhmad Rivandi dianggap melenceng pada DPD KNPI yang formal. Ia dianggap melenceng dan mengikuti gerbong KNPI kubu Arham Basman, ini dinilai memiliki kaitan dengan kepentingan politik menjelang Pemilu 2024. Menurut pandangan Sekretaris DPD KNPI Bulukumba kubu Andi Inas Utami Muchtar, A. Muh. Rifqi Ismulaial, keterpilihan Akhmad Rivandi sebagai Ketua DPD KNPI Bulukumba, pada saat Musda masih di bawah kepemimpinan Nurkanita Maruddani sebagai Ketua DPD KNPI Sulawesi Selatan yang diakui oleh pemerintah provinsi. Namun, pada saat menjelang pelantikan dan rapat kerja, Akhmad Rivandi mengubah haluan ke kubu DPD KNPI Sulawesi Selatan yang diketuai oleh Arham Basman. Surat Keputusan keterpilihan Akhmad Rivandi dikeluarkan oleh Arham. Penyebab perpindahan haluan Akhmad Rivandi, dimungkinkan karena adanya pengaruh kepentingan politik atau hal yang lainnya.

Kejadian itu, berkorelasi dengan teori pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan aksi alternatif untuk memilih jalan keluar masalah (Agus, 2016). Pengambilan keputusan juga berkaitan dengan fungsi manajemen. Pengambilan keputusan itu dapat dicon-

tohkan ketika ketua organisasi merencanakan, mengontrol, mengelola organisasi tentu ada keputusan yang mesti dilakukan. Pelopor teori manajemen Urwick dan Fayol memberi analisis, jika pengambilan keputusan akan berpengaruh terhadap otoritas dan delegasi (Kusnadi, 2015). Perspektif Chester Barnard dalam Kusnadi (2015) mengemukakan analisis secara komprehensif, jika pengambilan keputusan adalah teknik untuk mempersempit pilihan.

Dari hasil wawancara bersama Akhmad Rivandi, dapat dipahami jika dasar utama dualisme terjadi karena dua kubu DPD KNPI yang masing-masing ingin memperjuangkan idealisme dan menjadi fasilitator terhadap peningkatan taraf sosial dan kualitas sumber daya pemuda di Bulukumba. Padahal, sebenarnya jika ingin meningkatkan kualitas pemuda di Bulukumba mesti menjalankan satu komando, satu visi, dan satu prinsip yang sama. Hal ini lah yang membuktikan jika dualisme DPD KNPI Bulukumba tidak ideal dan tidak efektif.

Hal tersebut menunjukkan jika roda kepemimpinan organisasi DPD KNPI Bulukumba sarat akan kepentingan politik. Organisasi seolah-olah dijadikan sebagai kendaraan untuk menarik simpati masyarakat melalui program kerjanya, dengan skenario yang dimainkan oleh beberapa individu tertentu. Sehingga roda kepemimpinan dan implementasi program kerja organisasi sarat akan kepentingan politik.

Fenomena tersebut telah mempengaruhi manajemen organisasi politik dalam aspek pengorganisasian, perencanaan dan tujuan organisasi untuk menjalankan kepentingan bersama dan atas dasar kemaslahatan pemuda serta masyarakat. Dampak dualisme DPD KNPI Bulukumba kubu Andi Inas Utami Muchtar, tentu berpengaruh pada legalitas organisasi yang secara bermitra dengan pemerintah kabupaten. Menurut Sekretaris DPD KNPI Bulukumba kubu Andi Inas Utami Muchtar, A. Muh. Rifqi Ismulail, DPD KNPI Bulukumba yang dinahkodai oleh Andi Inas Utami Muchtar memiliki legalitas hukum, ini dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan (SK) terbaru yang diterima dari Kemenkumham pada bulan Juni 2022.

SK tersebut menunjukkan bahwa legalitas KNPI pusat dimandatkan kepada M. Ryano dan di Sulawesi Selatan diamanahkan kepada Nurkanita Maruddani sebagai Ketua KNPI Sulawesi Selatan, lalu kepengurusan DPD KNPI Bulukumba berdasarkan SK tersebut dimandatkan kepada Andi Inas Utami Muchtar. Hal ini tentu berbeda dengan kubu Akhmad Rivandi yang tidak memiliki SK dari Kemenkumham, tetapi hanya mendapat pengakuan dari pemerintah daerah Bulukumba. Perbedaan lainnya juga dapat dilihat dari segi tujuan organisasi, DPD KNPI versi Andi Inas Utami Muchtar murni menjalankan prinsip independen tidak terkontaminasi dengan praktik pragmatisme yang diintervensi oleh politikus, memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan pemuda secara idealis. Sementara DPD KNPI versi Akh-

mad Rivandi dipenuhi oleh kepentingan pragmatisme dan intervensi kepentingan politik.

Penjelasan tersebut menunjukkan jika organisasi DPD KNPI merupakan organisasi yang menuai banyak perbedaan pendapat, perbedaan tujuan, perbedaan visi untuk bagaimana memberdayakan pemuda, menjamin skill pemuda, mengakomodir kebutuhan mendesak masyarakat, dan bagaimana menjamin kualitas pendidikan pemuda yang ada di Kabupaten Bulukumba.

*Program Kerja Sarat Kepentingan*  
Sementara itu, dualisme DPD KNPI Bulukumba juga berdampak pada program kerja yang diimplementasikan oleh masing-masing kubu. Berdasarkan pandangan Sekretaris DPD KNPI Bulukumba kubu Andi Inas Utami Muchtar, A. Muh. Rifqi Ismulail, progres kepengurusan kubu Akhmad Rivandi, program yang mereka implementasikan tidak terlepas dari pengaruh politik dan didukung oleh oknum politikus yang tergabung di partai politik. Ini terbaca jelas pada saat kubu Akhmad Rivandi melakukan Musda dan rapat kerja yang dihadiri oleh Bupati Bulukumba beberapa waktu yang lalu. Ketua yang terpilih melalui hasil Musda itu adalah pengacara Bupati Bulukumba sendiri. Pada saat pemilihan, calon ketua lainnya yang berasal dari OKP mundur dari kontestasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh A. Muh. Rifqi Ismulail dari pengurus OKP yang hadir dalam Musda tersebut, proses pemilihan yang berlangsung di Musda itu dilakukan praktik politik transaksional. Sementara untuk kubu Andi Inas Utami

Muchtar didukung oleh OKP dari NU, Muhammadiyah dan Cipayung plus. Kubu Andi Inas tidak didukung oleh pemerintah daerah maupun para politikus di Bulukumba, sehingga kubu ini bersifat independen dan mandiri dari segi pembiayaan. forum musyawarah DPD KNPI ini mengukuhkan Andi Inas Utami Muchtar sebagai ketua yang terpilih secara aklamasi, dimana status Andi Inas Utami Muchtar adalah anak Bupati Bulukumba.

A. Muh. Rifqi Ismulail menuturkan jika DPD KNPI kubu Andi Inas secara murni mengedepankan idealisme kepemudaan dan tidak memiliki kepentingan politik, untuk menunjukkan citra yang baik di kalangan pemuda Bulukumba. Selain itu, kubu Andi Inas juga tidak memiliki kaitan dengan para politikus yang mencari kepentingan pribadi dengan memanfaatkan pemuda untuk menjalankan misi politiknya.

Perspektif tersebut sejalan dengan pandangan Karateker Ketua Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI Gantarang, Muh. Rizal, ia menilai eksistensi DPD KNPI Bulukumba memiliki pengaruh terhadap aktivitas politik. Meskipun terjadi dualisme DPD KNPI di Bulukumba dan kubu Andi Inas Utami Muchtar memiliki legalitas dari Kemenkumham, itu tidak mempengaruhi semangat dan partisipasi pemuda untuk berproses. Terjadinya dualisme DPD KNPI Bulukumba tentu karena adanya perbedaan pendapat dan perbedaan kepentingan, baik itu kepentingan politik, atau pun kepentingan organisasi. Hal yang terpenting adalah, pemuda yang tergabung

di dalam organisasi tersebut tetap harus bersikap bijak dan merawat silaturahmi. Kalaupun terjadi persaingan ataupun gengsi dari kedua kubu, alangkah baiknya jika hal itu dibuktikan dengan hal-hal positif yang berorientasi pada pemberdayaan pemuda di Bulukumba.

Pandangan tersebut menunjukkan jika DPD KNPI Bulukumba merupakan entitas organisasi sosial yang juga dipengaruhi oleh kepentingan politik. Sumber daya di dalam organisasi masing-masing menjalankan strategi dan siasat untuk bagaimana mempengaruhi masing-masing anggota di dalam organisasi. Fenomena adanya kepentingan politik dalam organisasi adalah bentuk intervensi formal dalam pola kehidupan organisasi. Dalam organisasi, cara pandang yang digaungkan adalah bagaimana berjalan sesuai dengan idealisme dan tujuan bersama. Akan tetapi dominasi tersebut seolah-olah menjadi to-peng untuk menyembunyikan kepentingan aktor organisasi untuk menyisipkan kepentingan politik didalamnya.

### ***Bentuk Kekuatan Politik DPD KNPI Bulukumba Pasca Dualisme***

#### ***Kedudukan Anggota DPD KNPI Bulukumba dalam Mengemban Peran Sebagai Birokrat***

Kedudukan yang diamanahkan kepada anggota DPD KNPI Bulukumba, baik sebagai birokrat ataupun kedudukan yang lainnya ini tentu memberikan suatu pengaruh yang cukup besar terhadap DPD KNPI Bulukumba itu sendiri. Menurut Sekretaris DPD KNPI Bulukumba kubu Andi Inas Utami Muchtar, A. Muh. Rifqi

Ismulail, pengurus maupun anggota DPD KNPI Bulukumba versi Andi Inas lebih banyak diisi oleh birokrat, akademisi dan professional, meskipun juga ada pengurus atau anggota yang maju sebagai calon legislatif. Andi Inas pun juga maju sebagai calon legislatif di Kota Makassar. Selain itu, pengurus DPD KNPI Bulukumba juga diisi oleh pemuda dari berbagai OKP, pengurus partai politik, anggota NU, Muhammadiyah dan Cipayung plus.

Menurut Sekretaris DPD KNPI Bulukumba, A. Muh. Rifqi Ismulail, di kubu Andi Inas Utami Muchtar, tidak punya kepentingan politik apapun di Bulukumba. Kepentingannya hanyalah memperjuangkan agar kepemudaan di Bulukumba dapat lebih progresif dan produktif, serta bagaimana mengurangi pengangguran di kalangan pemuda.

Secara teoritis di dalam organisasi tidak terlepas dengan adanya kepentingan. Kepentingan-kepentingan di dalam organisasi masing-masing dijalankan berbedabeda. Maiwan (2016) dan Sitepu (2012) mengemukakan kelompok kepentingan adalah organisasi yang terbentuk atas dasar adanya persamaan keresahan, visi, misi, tujuan dan sasaran yang sama antara masyarakat dan pemerintah. Sehingga, dalam *interest group*, terdiri dari dua kepentingan yang saling bersinergi dan berkolaborasi, yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah. Lahirnya kelompok kepentingan juga berangkat dari persamaan aktivitas, kegiatan dan agenda sosial politik yang akan dicapai. Oleh karena itu kepentingan itulah yang diper-

juangkan secara bersama-sama. Paoki dan Hanafie (2021) berpandangan bahwa orientasi dari kelompok kepentingan adalah bagaimana mereka mengambil peran pada proses perumusan dan penentuan kebijakan. Kerja sama antara masyarakat dan pemerintah melalui kelompok kepentingan akan dirumuskan berdasarkan hal-hal yang mereka kehendaki.

#### *Keikutsertaan Anggota DPD KNPI Sebagai Kader Partai Politik*

Sementara itu, kekuatan politik DPD KNPI Bulukumba kubu Akhmad Rivandi, dikuatkan oleh anggota-anggotanya yang berkecimpung sebagai anggota partai politik. Berdasarkan wawancara bersama Akhmad Rivandi, ia mengatakan bahwa anggota KNPI banyak yang terlibat dalam partai politik, karena banyak organisasi sayap partai yang ikut bergabung. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena pemuda KNPI merupakan bagian dari pembangunan politik untuk bangsa Indonesia.

Kekuatan politik antara DPD KNPI Bulukumba kubu Akhmad Rivandi dan pemerintah, khususnya legislatif terjalin dengan baik. Selain itu, hubungan antara DPD KNPI kubu Akhmad Rivandi dengan organisasi perangkat daerah berjalan dengan baik dan saling bersinergi. Dengan demikian, dapat dianalisis, jika kubu KNPI Akhmad Rivandi memiliki relasi dan kekuatan politik yang cukup baik bersama dengan pemerintah daerah. Urusan pemerintah daerah di bidang kepemudaan itu direpresentasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan Dinas Pemuda

dan Olahraga. Dengan begitu hubungan KNPI dengan pemerintah daerah terjalin dengan baik karena KNPI telah diikat di dalam peraturan daerah tentang kepemimpinan di Bulukumba.

Eksistensi anggota DPD KNPI Bulukumba banyak yang bergabung sebagai kader partai politik, khususnya di kubu Akhmad Rivandi. Oleh sebab itu, kekuatan politik dan relasi sosial yang terbangun di masyarakat cukup baik. Organisasi bawahan DPD KNPI Kabupaten Bulukumba, baik yang berlabel Dewan Pengurus Kecamatan (DPK), maupun organisasi sayap lainnya juga telah terintegrasi dengan kepentingan politik yang diperankan oleh anggota-anggotanya dari kalangan itu. Ketua DPD KNPI Bulukumba, Akhmad Rivandi saat di wawancarai penulis di kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai (DPC) PDIP Bulukumba menuturkan, meskipun dirinya adalah bagian dari partai politik, tetapi ia selalu berpikir positif untuk tetap menjalankan komitmennya bahwa KNPI harus terus berjalan sesuai koridornya, yaitu fokus dalam meningkatkan kualitas dan pemberdayaan pemuda dan masyarakat.

## KESIMPULAN

Dampak terjadinya dualisme DPD KNPI Bulukumba dalam perspektif manajemen organisasi politik yaitu lemahnya komitmen kerjasama dalam menjalankan kepemimpinan organisasi tunggal yang berimplikasi pada lemahnya kinerja organisasi. Pada saat yang sama dipengaruhi juga oleh lemahnya komitmen kader dalam menjalankan organisasi. Hal ini disebabkan

oleh perdebatan kubu siapa yang memiliki legalitas untuk memimpin DPD KNPI. Namun yang terpenting adalah dengan adanya dualisme kepemimpinan ini mendorong masing-masing kubu menjalankan program kerja berdasarkan kepentingan masing-masing.

Sementara itu, kekuatan-kekuatan politik yang hadir di tengah-tengah kedua kubu DPD KNPI Bulukumba, baik kubu Akhmad Rivandi maupun kubu Andi Inas Utami Muchtar dapat dilihat dari latar belakang anggota-anggotanya. Untuk kubu Akhmad Rivandi, kekuatan politiknya tentu mengarah kepada partai politik, dikarenakan di kubu ini banyak kader partai politik. Otomatis lembaga-lembaga sayap partai akan bermitra dan bersinergi dengan kubu Akhmad Rivandi. Di sisi lain, kekuatan politik kubu Andi Inas Utami Muchtar banyak bermitra dengan para birokrat, akademisi, organisasi keagamaan dan juga beberapa anggotanya adalah kader partai politik.

\*\*\*

## REFERENCES

- Agus. (2016). *Manajemen Organisasi*. IAIN Mataram.
- Bolman, L.G & Deal, T. . (2017). *Reframing Organizations: Artistry, Choice, and Leadership* (Edisi 6). Jossey-Bash Publishers.
- Dahl, R. (1994). *Analisis Politik Modern (Terjemahan)*. Bumi Aksara.
- Fitri, V. De, & Bukhari. (2017). Status

- Dan Fungsi Komite Nasional Pemuda Indonesia Analisis Sosiologi (Studi Penelitian pada DPD KNPI Provinsi Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 2, 1089–1110.
- Hanafie, H., & Azmy, A. S. (2018). *Kekuatan Kekuatan Politik*. Raja Grafindo Persada.
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. Rajawali Pers.
- Hutabalian, M. (2020). Dampak Dualisme Kepengurusan Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Terhadap Penegakan Hukum. *Jurnal Justia*, 02(01), 54–60.
- Hutabalian, M., & Editya, M. F. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Dualisme Kepengurusan Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Berdasarkan Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(18), 11–16.
- Kusdi. (2010). *Teori Organisasi dan Administrasi*. Salemba Humanika.
- Kusnadi, D. (2015). Pengambilan Keputusan Dalam Perilaku Organisasi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 15(2), 52–62.
- Lestari, Y. sri, Juraida, I., Triyanto, & Effida, D. Q. (2019). Sosialisasi Peran Pemuda-Pemudidalam Pemilihan Umum (PEMILU) di Nagan Raya Tahun 2019. *JurnalPengabdianMasyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, 1(1), 1–11.
- Maiwan, M. (2016). Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan Dan Kedudukannya Dalam Sistem Politik. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 15(2), 75–91. <https://doi.org/10.21009/jimd.v15i2.8815>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia (UI Press).
- Morgan, G. (1996). *Images of Organization*. Sage Publications.
- Nursamsami, A., Jasmal, A. S., & Hasrul, M. (2020). Strategi Komunikasi Pengurus KNPI Sulawesi Selatan Untuk Mendorong Partisipasi Program Kemitraan Organisasi Kepemudaan. *Jurnal Dakwa Tabligh*, 21 (2), 161–170.
- Palgunadi, M. M. (2016). Pengaruh Manajemen Konflik Dan Perubahan Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Papua. *Jurnal FuturE*, 4(1), 79–90.
- Paoki, V., & Hanafie, H. (2021). LGN Sebagai Kelompok Kepentingan (Studi Upaya Lingkar Ganja Nusantara (Lgn) Dalam Perubahan Uu No. 3 Tahun 2009 Tentang Narkotika). *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 2(1), 31–40.
- Purnomo, B. A. (2022). *Pemuda dan Nasionalisme Peranan KNPI Kota Tangerang Dalam Menanamkan Sikap Nasionalisme Pemuda Di Era Globalisasi*. UIN Syarif Hidayatullah

- Jakarta.
- Rahmi, N., & Sholehah, N. L. H. (2020). Politik Organisasi Dan Komitmen Organisasional Serta Dampaknya Terhadap Organizational Citizenship Behaviour (OCB) Pegawai Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus ASN Di Lingkup Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo). *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Samratulangi*, 7(3), 512–532.
- Riinawati. (2021). *Pengantar Teori Manajemen Komunikasi dan Organisasi*.  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=477593>
- Rompis, A. V., Pioh, N., & Kimbal, A. (2019). Partisipasi Politik Pemuda (Studi di Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–10.
- Sahputra, D. (2020). Manajemen Komunikasi Suatu Pendekatan Komunikasi. *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study*, 6(2), 152–162.
- Salsabilah, W., & Putri, R. Y. (2022). Kekuasaan Dalam Ranah Kajian Politik Dan Organisasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1), 29–42.
- Sartori, G. (1984). *Parties and Party Systems*. Cambridge University Press.
- Sitepu, A. (2012). *Studi Ilmu Politik*. Graha Ilmu.
- Suwarji. (2022). Peranan Pemuda dalam Partisipasi Menyukkseskan Kegiatan Yang Terafiliasi Partai Politik. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 1(3), 134–148.
- Utomo, N. S. (2015). Manajemen Komunikasi Eksternal ( Manajemen Komunikasi Pt . Semen Indonesia ( Persero ) Tbk Dalam Proses Pembangunan Pabrik Semen Di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang ). *Jurnal Komuniti : Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 7(2), 63–67.
- Winardi. (2004). *Manajemen Perilaku Organisasi*. Kencana Prenada Media Group.
- Wirawan. (2009). *Konflik dan Manajemen Konflik*. Salemba Humanika.
- Zainuddin, H. (2021). Kontribusi Organisasi Muhammadiyah Dan NU Pada Pilpres 2019. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(2), 3818–3830.
- Zusma, M. (2016). Dinamika Dalam Sukses Kepemimpinan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau Tahun 2014. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2), 1–15.

## **Wawancara**

Arfan, Ahmad. (2023, 17 Juli). Ketua Kesbangpol Bulukumba. Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

A.Muh. Rifqi Ismulail. (2023, 30 Juli). Sekretaris DPD KNPI II Bulukumba Kubu Andi Inas Utami Muchtar, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

Rivandi, Akhmad. (2023, 17 Juli). Demisioner Ketua DPD KNPI II Bulukumba, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.

Rizal, Muhammad. (2023, 17 Juli). Ketua DPK KNPI Gantarang Kubu Andi Inas Utami Muchtar.